

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah atau sektor terhadap suatu masalah (Wahab, 2002:13). Harold D. Laswell (dalam Badjuri Yuwono, 2003:9) menyatakan “*policy is projected programme of goal, values and practice*”, bahwa kebijakan adalah suatu program yang di proyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.

Beberapa pendapat lain mengenai definisi kebijakan yakni, William N. Dunn (dalam Pasolong 2010:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain

Sedangkan Thomas R. Dye (dalam Pasolong 2010:39), kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Kebijakan public seringkali terbentuk dari kompromi politis diantara para perumus dan tidak seorang pun perumus kebijakan merupakan pencetus murni dari masalah yang disepakati. Kebijakan lahir dari sistem perumusan kebijakan. Menurut Winarno (2004:28) dalam hal penyusunan kebijakan, terdapat tahap-tahap yang harus dilaksanakan secara berurutan antara lain :

a. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk pada agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini masalah-masalah tersebut diseleksi menurut skala prioritasnya.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik dari berbagai alternative yang ada.

c. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Implementasi Kebijakan

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilakukan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

e. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu memecahkan masalah. Kebijakan public pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan public telah meraih tujuan yang diinginkan.

Sehingga secara garis besar, kebijakan public (*public policy*) merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, dimana tindakan-tindakan tersebut berupa alternative-alternatif pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu yang diharapkan dapat berorientasi pada kepentingan publik.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan public merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan public (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak

dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Presman dan Wildavsky menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Agak mirip dengan pandangan kedua ahli, Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2010:64) merumuskan proses implementasi ini sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno Budi, 2007: 146) berpendapat bahwa :

“Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang berikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*trangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan dan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan”.

Implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Nugroho Riant, 2012:685) adalah upaya melaksanakan keputusan

kebijakan. Maksudnya ialah bahwa berbagai upaya atau program yang dilakukan oleh pemerintah merupakan implementasi dari suatu kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan.

Implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan dengan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan di atas berupa uang. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi serta rencanaa-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau batasan-batasan tentang kegiatan ataupun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Menurut Grindle (dalam Leo Agustino 2017:42) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

2.2.1 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai suatu objek, situasi atau proses. Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas : (1) program (kebijakan) yang dilaksanakan, (2) target group (kelompok masyarakat yang menjadi sasaran), (3) unsur pelaksana (implementor), (4) faktor lingkungan (fisik, budaya, dan politik).

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Calr Van Horn, George C. Edward III, Merilee S. Grindle, dan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model yang pertama yaitu model implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Van Horn (dalam Budi Wiinarno 2016:142) Adapun 6 (enam) variabel-variabel tersebut yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn adalah

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

2. Sumber-sumber Kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam praktek implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar pada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi didalam dan antar organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja.

4. Karakteristik Badan-badan Pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-

berulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personel mereka. Di samping itu perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan.

5. Kondisi-kondisi ekonomi sosial, politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan public merupakan pusat perhatian yang benar selama dasarwasa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan public secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian yang kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

6. Kecendrungan pelaksana (implementor)

Arah kecendrungan-kecendrungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, penerimaan terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para

pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil.

Menurut George Edward III (dalam Agustino, 2014:149-153) ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan). Komunikasi antar organisasi yang terkait sebagai pelaksana kebijakan sangat penting untuk menunjang efektivitas implementasi. Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif jika para pelaksana yang terlibat dalam implementasi mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan. Terdapat 3 indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik juga. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miss komunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus

dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang di harapkan terdirtorsi ditengah jalan.

- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

2. Sumber Daya (*resources*)

Dalam implementasi kebijakan sumberdaya yang berperan serta dibutuhkan dalam implementasikebijakan, yaitu :

- a. Staf, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
- b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yang pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Yang kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ditetapkan.
- c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
- d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Ketersediaan sumber daya dalam suatu organisasi juga merupakan suatu hal yang harus dimiliki dan berpengaruh besar terhadap pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber kebijakan mempunyai makna yang cukup luas, sumber-sumber yang tersedia atau terlibat dalam implementasi kebijakan selain dukungan pendanaan implementasi kebijakan juga mencakup orang-orang yang mempunyai kompetensi yang menjadi dari segi jumlah dan kemampuan, sarana dan prasarana termasuk akses terhadap informasi yang jelas dan cepat.

3. Disposisi (*disposition*)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ini efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal yang harus dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III, adalah

- a. Pengangkatan birokrat, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga
- b. Insentif, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan pemerintah dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, memungkinkan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumber daya menjadi tidak efektif akan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Grindle (1980) (dalam Subarsono, 2005:93) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel kebijakan ini mencakup : (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan ; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat ;

(5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementor dengan rinci; (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa

Pada dasarnya banyak para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai teori implementasi kebijakan. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang telah dipaparkan diatas pada penelitian ini, peneliti mengukukan model implementasi George C. Edward III karena disesuaikan dengan kondisi permasalahan penelitian yakni untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencemaran Air. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Agustino Leo, 2008: 149-153) ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut: (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi, (4) Stuktur birokrasi.

2.3 Hasil Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam penelitian ini antara lain :

1. Penelitian Anggi Pertiwi tahun 2016, yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian

Pencemran Air Studi Tentang Kepemilikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) oleh Pengelola Usaha Laundry di Kota Pontianak”.

Pembahasan dalam skripsi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang mengungkapkan 6 variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum adanya kepemilikan instalasi pengelola air limbah (IPAL) pada beberapa usaha laundry yang ada di Kota Pontianak. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengendalian pencemaran air di Kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia terkait jumlah pegawai pengawas Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang belum memadai hal tersebut mengakibatkan sumber daya waktu untuk melakukan pengawasan maksimal dua kali dalam setahun. Kurangnya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana mengalami kendala pada penyampaian informasi antar pelaksana kebijakan dengan target group. Keterbatasannya dana para pengelola usaha laundry untuk pengadaan IPAL. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu fokus dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pengendalian pencemaran air di Kota Pontianak. Namun perbedaannya adalah tempat penelitian yang dilakukan yaitu di usaha rumah makan sedangkan penelitian yang terdahulu di usaha laundry. Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan eksploratif sedangkan peneliti terdahulu adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

2. Ivan Maulana 2016, “Pengawasan Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak”

Penelitian ini didasari pada fenomena banyak pemilik dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha rumah makan di Kota Pontianak yang membuang limbah cair langsung ke lingkungan tanpa ada proses pengolahan terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis

pengawasan kepemilikan instalasi pengelola air limbah rumah makan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan konsep teknik pengawasan dari Sondang P.Siagian sebagai pisau analisis yang mencakup dua hal yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi pengawasan langsung yaitu jumlah pegawai pengawas dan kurangnya kesadaran pihak rumah makan saat kunjungan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengawasan tidak langsung yaitu biaya yang cukup mahal yang harus dikeluarkan untuk pengadaan instalasi pengolahan air limbah rumah makan skala kecil.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama memiliki fokus pada usaha rumah makan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dari penggunaan teori sebagai pisau analisis. Penelitian terdahulu menggunakan teori Sondang P.Siagian berupa metode pengawasan yang dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Sementara itu penelitian yang sekarang menggunakan teori dari Van Meter Van Horn 6 variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

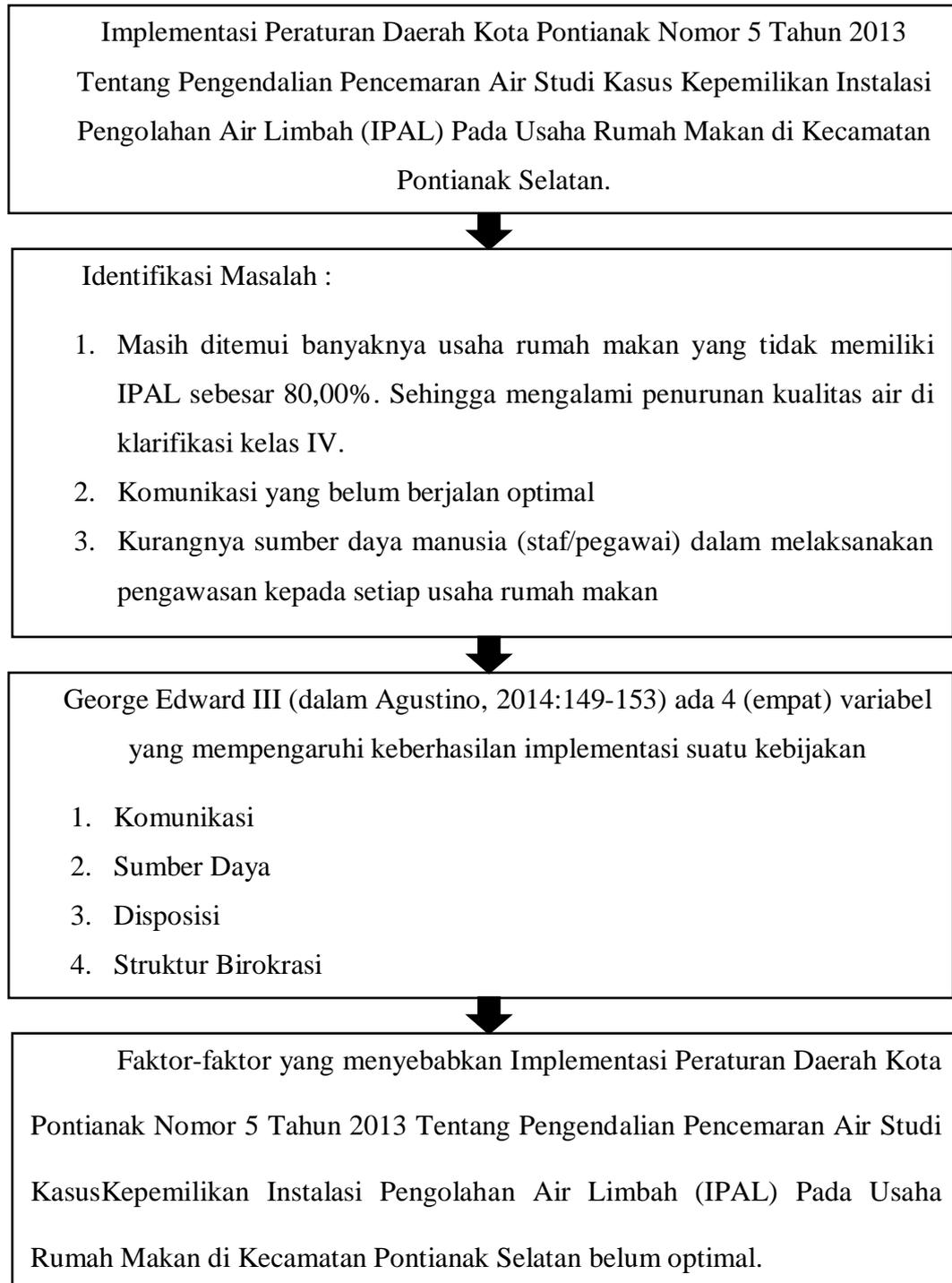
2.3 Kerangka Pikir

Dalam hal ini peneliti akan meneliti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Sejauh ini masih banyak pelaku usaha rumah makan yang tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Kota Pontianak, serta kurangnya kesadaran pengelola usaha rumah makan akan pentingnya Instalasi Pengelola Air

Limbah (IPAL). Bertitik tolak dari landasan teori dapat dijadikan acuan dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat dalam kerangka pikir.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



2.4 Asumsi/Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian diatas, pertanyaan penelitian dapat dibuat yaitu :

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan Usaha Rumah Makan dalam Mengimplementasikan PERDA Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencemaran Air Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Pada Usaha Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Selatan?
2. Bagaimana ketersediaan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengimplementasikan PERDA Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencemaran Air Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Pada Usaha Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Selatan?
3. Bagaimana disposisi Dinas Lingkungan Hidup dengan Usaha Rumah Makan dalam Mengimplementasikan PERDA Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencemaran Air Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Pada Usaha Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Selatan?
4. Bagaimana struktur birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengimplementasikan PERDA Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencemaran Air Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Pada Usaha Rumah Makan di Kecamatan Pontianak Selatan?